

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DINAMIKA TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG TIDAK
MEMPUNYAI KEWENANGAN DALAM PENYALURAN DANA HIBAH
DARI PEMERINTAH
(Studi Kasus Putusan No.70/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY)**

SKRIPSI



Disusun oleh:

MARCHUMAH

202010110311592

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP DINAMIKA TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG TIDAK
MEMPUNYAI KEWENANGAN DALAM PENYALURAN DANA HIBAH
DARI PEMERINTAH**

(Studi Kasus Putusan No.70/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum

Disusun oleh:

MARCHUMAH

202010110311592



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

SKRIPSI

Disusun oleh:

MARCHUMAH

202010110311592

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 04 Oktober 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji I : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Handwritten signatures and numbers of the exam board members. The top signature is crossed out with a large blue 'X' and has the number '9' written next to it. Below it are two more signatures, one with the number '3' and another with the number '2'.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DINAMIKA TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG TIDAK
MEMPUNYAI KEWENANGAN DALAM PENYALURAN DANA HIBAH
DARI PEMERINTAH (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 70/PID.SUS-
TPK/2023/PT SBY)**

Diajukan Oleh:

MARCHUMAH

202010110311592

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 04 Oktober 2025

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MARCHUMAH
NIM : 202010110311592
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DINAMIKA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN DALAM PENYALURAN DANA HIBAH DARI PEMERINTAH (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 70/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

15 Oktober 2025

MARCHUMAH

DAFTAR ISI

Halaman Judul Depan	i
Halaman Judul Belakang	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
Daftar Lampiran	vii
Abstrak.....	viii
<i>Abstract</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Yuridis-Sosiologis.....	15
2.2 Tindak Pidana.....	18
2.3 Tindak Pidana Korupsi	32
2.4 Teori Penyalahgunaan Kekuasaan	44
2.5 Konsep Subjek Hukum Substantif dalam Hukum Pidana	47
2.6 Relasi Sosial dan Patronase dalam Konteks Hukum	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
3.1. Kasus Posisi.....	52
3.2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PT SBY	55
3.3. Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Korupsi oleh Pihak yang Tidak Berwenang dalam Perspektif Hukum Pidana	66
BAB IV PENUTUP	77
1. Kesimpulan.....	77
2. Saran.....	79
Daftar Pustaka.....	83
Sertifikat Plagiasi	87
Lampiran	88

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Putusan	88
Lampiran 2 Surat Tugas	152
Lampiran 3 Kartu Kendali	153



Abstrak

Nama : MARCHUMAH
NIM : 202010110311592
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DINAMIKA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN DALAM PENYALURAN DANA HIBAH DARI PEMERINTAH (Studi Kasus Putusan No.70/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY)**
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
2. Ratri N. Erdianti, S.H., M.H

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki kewenangan formal dalam penyaluran dana hibah dari pemerintah, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 70/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi dokumen berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan artikel ilmiah yang dianalisis dengan teknik *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa yang tidak memiliki kedudukan sebagai pejabat publik terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa rekayasa kelompok penerima hibah, pemalsuan dokumen, dan pengendalian dana secara fiktif, yang memenuhi unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Perbuatan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan pengaruh informal dan celah dalam mekanisme pengawasan birokrasi. Pendekatan substantif terhadap subjek hukum pidana memungkinkan hakim untuk tetap menjatuhkan hukuman terhadap individu non-struktural yang berperan aktif dalam merugikan keuangan negara. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki jabatan resmi, tetapi juga oleh individu yang memanfaatkan relasi sosial dan jaringan kekuasaan non-formal. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan, transparansi distribusi dana hibah, serta penegakan hukum yang responsif terhadap bentuk kekuasaan informal menjadi sangat penting untuk mencegah korupsi yang bersifat tersembunyi dan sistemik.

Kata Kunci: Korupsi, dana hibah, tanpa kewenangan, subjek hukum substantif.

Abstract

Nama : MARCHUMAH
NIM : 202010110311592
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DINAMIKA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN DALAM PENYALURAN DANA HIBAH DARI PEMERINTAH (Studi Kasus Putusan No.70/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY)**
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
2. Ratri N. Erdianti, S.H., M.H

This study aims to analyze acts of corruption committed by individuals who do not hold formal authority in the distribution of government grant funds, with a case study on Court Decision Number 70/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY. This research employs a juridical-sociological approach using a descriptive qualitative method. Data were obtained through document studies, including court decisions, statutory regulations, legal literature, and scholarly articles, and analyzed using content analysis techniques. The findings reveal that the defendant, despite not being a public official, was proven to have committed unlawful acts such as manipulating recipient groups, falsifying documents, and controlling disbursement and use of funds fictitiously, thereby fulfilling the elements stipulated in Article 3 of the Anti-Corruption Law. These actions reflect a misuse of informal influence and weaknesses in bureaucratic oversight mechanisms. The substantive approach to legal subjectivity enabled the judges to impose criminal liability on non-structural individuals who actively contributed to state financial losses. This study concludes that corruption is not limited to those with formal government positions; rather, it can also be committed by individuals who exploit social relationships and informal power networks. Therefore, strengthening oversight, ensuring transparency in grant fund distribution, and enforcing laws that respond to informal power structures are crucial for preventing covert and systemic corruption.

Keywords: Corruption, government grants, lack of formal authority, substantive legal subject

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat hidayah dan karunianya sehingga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DINAMIKA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN DALAM PENYALURAN DANA HIBAH DARI PEMERINTAH (studi kasus Putusan No.70/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY)”** sebagai tugas akhir dalam memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Serta salam tercurahkan kepada nabi kita nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi tauladan bagi seluruh umatnya di muka bumi ini.

1. Terimakasih kepada dosen pembimbing saya, Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum dan Ratri N. Erdianti, S.H., M.H – yang telah membimbing saya dalam pembuatan skripsi ini.
2. Terimakasih untuk jajaran dosen yang selama ini telah memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya dapat sampai ke titik ini.
3. Terimakasih kepada orang tua yang selalu memberikan dukungan kepada saya.
4. Untuk customer salon saya, terimakasih yang secara tidak langsung membantu finansial saya yang selanjutnya saya gunakan untuk dana perkuliahan saya.

5. Untuk teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan informasi, dukungan moril dan doa. Semoga senantiasa Allah selalu menjaga kalian.

Saya sebagai penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna, untuk itu, saya sangat terbuka untuk menerima saran dan masukan yang membangun supaya saya dapat berproses kembali.

Terimakasih, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Malang, 12 Agustus 2025

Penulis,

Marchumah



Ungkapan Pribadi

“Saya menyadari bahwa saya bukanlah orang yang cepat dalam memahami sesuatu, tetapi saya percaya bahwa setiap langkah kecil yang konsisten akan membawa saya sampai pada tujuan. Keterlambatan bukanlah kelemahan, melainkan proses belajar untuk lebih sabar, telaten, dan menghargai setiap pencapaian sekecil apa pun.”



Motto Hidup

*“Tidak masalah berjalan lambat,
yang penting tidak berhenti.”*

Daftar Pustaka

Buku:

- Adami Chazawi. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Chazawi, A. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlaku Hukum Pidana, 2002.
- Evi Hartanti, S. H. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika, 2023.
- Huda, M. C., & S. H. I., M. H. Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis). The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Max Weber. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Ed. Guenther Roth & Claus Wittich. Berkeley: University of California Press, 1978.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, 1983 & Rajawali Pers, 2008.
- Moch. Nur Ichwan. Sosiologi Hukum: Pendekatan, Teori, dan Implikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Putra, R. P. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Deepublish, 2021.

Soerjono Soekanto. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Jurnal, Disertasi, dan Artikel Akademik:

Alam, S. (2017). Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek di Indonesia. JHR (Jurnal Hukum Replik), 5(2), 157–171.

Ardila, I., Yulianti, Y., Fauziah, D. A., dkk. (2023). Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Tindakan Korupsi Bantuan Sosial Oleh Pejabat Publik Perspektif Max Weber. REFORMASI, 13(2), 222–234.

Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. Kertha Widya, 1(1).

Chairi, E. (2019). Ketiadaan Otoritas Terpusat Dalam Fenomena Kontemporer di Indonesia: Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber. SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan, 2(2), 197–215.

Chandra, W., & Hamonangan, M. K. (2024). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(10).

Daryoko, D. (2024). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- Firdaus, M. M. F. (2015). Analisa Kritis terhadap “Penyalahgunaan Wewenang”.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 20(3), 178798.
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Indonesia melalui
Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. University Of
Bengkulu Law Journal, 4(1), 35–58.
- Hsb, P. H. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum. *Yurisprudencia:*
Jurnal Hukum Ekonomi, 1(1), 42–53.
- Kasiyanto, H. A., & SH, M. (2018). Tindak Pidana Korupsi: Pada Proses Pengadaan
Barang dan Jasa. Prenada Media.
- Kumombong, Y. (2022). Kajian Yuridis Mengenai Tindak Pidana Korupsi Dana
Bantuan Sosial COVID-19. *Lex Privatum*, 10(3).
- Njoto, D. L. B. (2024). Rekonstruksi asas *actus non facit reum nisi mens rea* dalam
tindak pidana. *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 3344–3355.
- Nuryadi, H. D., & Sh, M. H. (2016). Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di
Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE*, 1(2), 394–408.
- Raka Aryo Wibowo. (2023). Konfigurasi Kekuasaan Informal dalam Skema
Korupsi Hibah Pemerintah: Studi Kasus Jawa Timur. *Jurnal
Antropologi Indonesia*, 45(1), 80–96.
- Reza Alvian Pratama. (2024). Hubungan Patron-Klien dalam Praktik Korupsi
Kebijakan Publik. *Jurnal Kajian Politik dan Pemerintahan*, 10(2),
121–132.
- Saragih, Y. M., Prasetyo, T., & Hafidz, J. (2018). Analisis Yuridis Kewenangan
KPK sebagai Penuntut Pelaku Korupsi. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu
Hukum*, 5(1), 33–44.

Tjahjoko, G. T. (2015). Politik Ambivalensi: Nalar Elite di Balik Pemenangan Pilkada. PolGov.

Yumrotun, Y. (2024). Tinjauan Yuridis Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Putusan dan Peraturan Perundangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 3241 K/Pid.Sus/2014.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PT SBY (Surabaya: Mahkamah Agung RI, 2023).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berita Online/Website:

KPK Periksa Maraton 65 Orang Ketua Pokmas Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim. RM.ID. Diakses 16 Mei 2025.

<https://rm.id/amp/baca-berita/nasional/233855/korupsi-dana-hibah-jatim-kpk-periksa-maraton-65-orang-ketua-pokmas>.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Marchumah

Nim : 202010110311592

Dengan Judul Skripsi :

" TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DINAMIKA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN DALAM PENYALURAN DANA HIBAH DARI PEMERINTAH(Studi kasus Putusan No. 70/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY) "

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 September 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum